

KONSUMSI MINYAK SAWIT (CPO)

DOMESTIK DAN EKSPOR (GAPKI)

1. Konsumsi untuk Biodiesel Domestik

- Januari - Juli 2025: Konsumsi mencapai 7,23 juta ton.
- Angka ini naik dari periode yang sama tahun 2024 yang tercatat 6,44 juta ton.
- Sepanjang Tahun 2024: Total konsumsi adalah 11,44 juta ton.

2. Konsumsi untuk Pangan Domestik

- Januari - Juli 2025: Konsumsi mencapai 5,77 juta ton.
- Angka ini naik tipis dari periode yang sama tahun 2024 yang tercatat 5,76 juta ton.
- Sepanjang Tahun 2024: Total konsumsi adalah 10,20 juta ton.

3. Ekspor Biodiesel

- Januari - Juni 2025: Konsumsi minyak sawit untuk biodiesel ekspor tercatat nol (0) ton.
- Sepanjang Tahun 2024: Total konsumsi minyak sawit untuk biodiesel ekspor adalah 73.000 ton.

ALOKASI BIODIESEL B40

TAHUN 2025 (KEMENTERIAN ESDM)

- Total Alokasi B40 Tahun 2025: 15,6 juta kiloliter (kl).
- Jumlah ini setara dengan 81% dari total kapasitas pabrik biodiesel Indonesia.
- Rincian Alokasi:
 - Untuk Public Service Obligation (PSO): 7,55 juta kl.
 - Untuk Non-PSO: 8,07 juta kl.

EDISI RABU, 29 OKTOBER 2025

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02

GOVERNMENTTODAY
Jutaan KPM Tak Layak Terima Bansos,
Ada yang Main Judol

06

NUSANTARA
Menguat! Sinyal Rumus Upah Minimum
2026 Diubah

10

LISTSTYLE
Rahasia Tampil Profesional
Lewat Pilihan Tas yang Tepat

RENCANA PENGGUNAAN B50, PENGUSAHA DAG DIG DUG

Pemerintah bertekad mencapai kedaulatan energi nasional dengan menghentikan impor solar mulai tahun 2026. Guna mencapai tekat tersebut, pemerintah akan menerapkan mandatori penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati (fatty acid methyl ester/FAME) atau Biodiesel B50. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan keputusan tersebut merupakan langkah strategis sekaligus bentuk keberpihakan negara terhadap kemandirian energi. Dia yakin program B50 akan menggantikan seluruh kebutuhan solar impor yang selama ini masih menekan devisa negara. Bahlil mengungkapkan pemanfaatan biodiesel selama 2020-2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS. Pada 2025, impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau 10,58 persen dari total kebutuhan nasional. Maka, penerapan B50 pada 2026 potensi penghematan tambahan hingga 10,84 miliar dolar AS hanya dalam satu tahun. Untuk implementasi B50 akan menjadikan pasokan solar sepenuhnya berasal dari sumber daya domestik dengan memaksimalkan potensi sawit dalam negeri. Bahlil pada Selasa (28/10/2025) mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan skema kewajiban penjualan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) untuk pasar domestik (Domestic Market Obligation/ DMO). Hal ini sebagai salah satu opsi untuk meningkatkan kebutuhan pasokan CPO untuk program B50 pada 2026. Di satu sisi, tekat pemerintah terkait kedaulatan energi dengan B50 ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha, khususnya pengusaha kelapa sawit dan tambang. Bahkan mereka meminta pemerintah membatalkan program tersebut karena akan berdampak pada sektor bisnis mereka.

BACA HAL 11...



B50

JUTAAN KPM TAK LAYAK TERIMA BANSOS, ADA YANG MAIN JUDOL

Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial (bansos) baik reguler maupun bantuan tunai tambahan pada medio triwulan IV tahun 2025. Selain itu, Kemensos juga mencoret sekitar 600 ribu KPM karena terindikasi bermain judi online (Judol).

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan sebanyak dua juta KPM itu berdasarkan uji lapangan dan verifikasi data yang dilakukan bersama pemerintah daerah dalam lima hari terakhir. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Turun dari pendamping kami dan juga dari sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dilakukan pengecekan lapangan secara langsung. Hasilnya per hari ini sudah dua juta lebih KPM yang dinyatakan tidak layak menerima bansos," katanya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Proses verifikasi dilakukan secara simultan oleh petugas pendamping sosial dan perangkat daerah di kabupaten/kota dengan menggunakan pendekatan drone check atau verifikasi lapangan bersama, untuk mencocokkan data penerima dengan kondisi faktual.

Gus Ipul menandakan bahwa penyesuaian data ini penting karena terdapat lebih dari 15 juta calon penerima baru. Saat ini calon penerima baru ini juga yang sedang diverifikasi untuk program bantuan sosial reguler - maupun bantuan langsung tunai sementara (BLTS) medio Oktober-November-Desember senilai Rp900 ribu.

"Ya sekali lagi saya mohon kesabarannya karena yang baru ini masih perlu crosscheck ke sejumlah pihak. Ya mudah-mudahan paling lambat November sudah tersalurkan semua," kata dia.

Terlepas dari situ, Kementerian Sosial mengapresiasi kepada setiap kepala daerah yang responsif dalam memperbarui data penerima manfaat.

Adapun data hasil verifikasi atau data balikan dari daerah, kata dia, akan menjadi dasar bagi Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat validasi dan pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi ketepatan penyaluran bantuan sosial ke depannya.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja



dengan baik, sehingga dalam waktu singkat kita mendapatkan data balikan yang sangat penting untuk diteruskan ke BPS," ujarnya dilansi antara.

Sementara itu, terkait dengan 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi bermain judi online, Gus Ipul mengatakan bahwa jumlah tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan PPKATK.

"Ketemu lah 600 ribu lebih penerima bansos yang dari Kementerian Sosial itu ditengarai ikut bermain judol, 600 ribu itu kita coret semua, yang memang terbukti dan setelah dilakukan pendalaman memang ternyata benar adanya, maka kita coret penerima bansos," kata Ipul.

Meski demikian, Gus Ipul mengatakan bagi masyarakat yang memang sangat dibutuhkan, diberi kesempatan kedua. Caranya, masyarakat bisa menghubungi RT-RW hingga dinas setempat agar bisa mendapat bansos lagi.

"Bagi mereka yang memang sangat membutuhkan, itu bisa melakukan reaktivasi. Dengan cara menghubungi RT, RW, kelurahan atau dinkos setempat atau lewat aplikasi yang kita siapkan. Jadi bagi yang sangat-sangat membutuhkan kita beri kesempatan kedua," katanya.

Ipul mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk memperluas jangkauan penerima bansos. Menurutnya, Prabowo memerintahkan membuat data tunggal sosial

ekonomi.

"Berdasarkan instruksi Presiden, kita mulai kerja dengan data yang benar. Datanya akurat, datanya tunggal, datanya sama. Ini dulu. Nah berdasarkan data tunggal, sosial ekonomi nasional ini lah kemudian kita mencoba melakukan verifikasi dan validasi," ujarnya.

Ribuan penerima bansos yang terindikasi main judol ini ada di berbagai kota, di antaranya Jakarta dan Yogyakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengungkap adanya 5.000 penerima bansos yang teridentifikasi bermain judi online berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sementara, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima laporan sebanyak sekitar 7.100 penerima bansos yang digunakan untuk judol.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan sekitar 5.000 penerima bansos yang main judol tersebut. "Yang pertama hal yang berkaitan judol, memang ada data dari PPKATK. Kami segera tertibkan untuk itu," kata Pramono di Jakarta Barat, Senin (27/10/2025).

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengungkapkan, ada sekitar 602.000 warga Jakarta yang terlibat dalam aktivitas judi online. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran PPKATK terhadap transaksi keuangan masyarakat.

"Dari 602.000 warga Jakarta yang

terlibat judi online tersebut, telah melakukan transaksi judol mencapai Rp 3,12 triliun," ujar Rano dalam "Podcast on the Spot" Pameran Kinerja dan Publikasi Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan RI 2025, Minggu (26/10/2025).

Sementara, Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsi mengatakan, informasi ribuan penerima bansos yang main judol ini diperoleh dari PPKATK. "DIY banyak, tujuh ribuan," kata Endang, Selasa (28/10/2025).

Endang mengaku masih akan melakukan cek dan ricek data dari Kemensos ini bersama pemerintah kabupaten/kota se-DIY guna memastikannya. "Kami baru ngecek, bener nggak ini terkait judol," ujarnya.

Dia menandakan bahwa Pemda DIY akan mematuhi kebijakan pusat untuk menindaklanjuti hasil pengecekannya nanti. Apakah dicoret alias dicabut dari daftar penerima manfaat bansos atau ada alternatif solusi lainnya. "Kalau benar, nanti kami kebijakan pusat juga kan, untuk kita beri masukan apakah diberhentikan atau bagaimana," katanya dilansir cnnindonesia. (han,ant,ist/lut)



Turun dari pendamping kami dan juga dari sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dilakukan pengecekan lapangan secara langsung. Hasilnya per hari ini sudah dua juta lebih KPM yang dinyatakan tidak layak menerima bansos,"

SAIFULLAH YUSUF
Menteri Sosial

UMRAH MANDIRI HARUS ADA PERATURAN DAN PANDUAN KHUSUS

Pemerintah membukakan pintu untuk umrah mandiri berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PIHU). Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa untuk masyarakat yang memilih umrah mandiri harus ada peraturan dan panduan khusus yang diterbitkan pemerintah.

Anggota Komisi VIII DPR, Ashari, menilai panduan tersebut penting agar pelaksanaan umrah tetap sesuai syariat dan jemaah bisa beribadah dengan tenang dan selamat. "Pemerintah perlu segera menerbitkan panduan agar pelaksanaan umrah mandiri tetap memenuhi syarat sahnya, serta memastikan jemaah beribadah dengan sehat, nyaman, dan selamat," ujar Ashari dalam keterangan, Selasa (28/10/2025).

Meski dilakukan secara mandiri, kata Ashari, pelaksanaan umrah tetap harus melalui aplikasi Nusuk yang dikembangkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ketentuan itu termasuk mengatur pemesanan hotel.

Oleh karena itu, menurutnya, Kementerian Agama RI perlu menyesuaikan kebijakan dan menyiapkan regulasi pendukung. "Panduan yang jelas akan sangat membantu jemaah yang ingin berumrah secara mandiri. Jangan sampai pelaksanaan umrah tidak sah secara syariat dan merugikan jemaah hanya karena kekeliruan teknis, seperti pengambilan miqat, tata cara ibadah, atau ketentuan barang bawaan," ujar politikus PKB itu.

Menurut Ashari, keselamatan jemaah menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, serta atase haji di Arab Saudi



Anggota Komisi VIII DPR, Ashari.

sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2019.

Dia mengingatkan masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan matang sebelum berangkat. "Kami berharap masyarakat bijak mempelajari tata pelaksanaan umrah dan semua ketentuannya. Jangan sampai aspek sah ibadah terabaikan hanya karena ingin melaksanakan secara mandiri," katanya.

Hal senada juga disampaikan, Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania yang mengatakan bahwa legalisasi perjalanan umrah secara mandiri jangan sampai membuat pemerintah mengabaikan perlindungan terhadap jemaah.

Umrah mandiri melalui platform Nusuk Umrah, kata Dini, memang menjadi perubahan besar dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah

umrah. Namun, perlu digarisbawahi, kemudahan akses digital tidak boleh menghilangkan aspek tanggung jawab.

"Pemerintah tetap harus memastikan adanya mekanisme pengawasan, verifikasi, dan mitigasi risiko, baik bagi jemaah yang berangkat secara mandiri maupun melalui penyelenggara," kata Dini di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Legislator Partai NasDem itu mengatakan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut urusan ibadah harus menempatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan jemaah sebagai prioritas utama.

Ia mendorong pemerintah menyusun regulasi turunan yang menjamin adanya keseimbangan antara inovasi digital dan keberlanjutan ekosistem penyelenggara umrah nasional.

Jika skema umrah mandiri dibiarkan tanpa regulasi turunan yang jelas, kata dia, maka manfaat ekonominya bisa lari ke luar negeri. Sedangkan industri perjalanan umrah nasional kehilangan daya saing.

Dini memastikan Komisi VIII DPR terus mengawal agar transformasi digital dalam penyelenggaraan umrah agar tidak menimbulkan korban baru di lapangan, baik jemaah maupun pelaku usaha. Menurutnya, transformasi itu harus menjadi sarana peningkatan efisiensi, transparansi, dan pelayanan umat.

Di sisi lain, Dini memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) dan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah lainnya.

Dia pun menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh asosiasi, yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Dini, langkah itu merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara.

"Namun dari sisi DPR, kami menilai bahwa UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) masih bisa dioptimalkan melalui peraturan pelaksana yang lebih rinci, bukan harus langsung direvisi," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memaparkan dilegalkannya umrah mandiri merupakan upaya pemerintah melindungi seluruh jemaah umrah mandiri. UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PIHU) kini memberikan izin pelaksanaan umrah secara mandiri tanpa melalui panitia penyelenggara atau pemerintah.

UU tersebut belum lama disahkan pada 26 Agustus lalu, dan menjadi perubahan ketiga dari UU sebelumnya Nomor 8 Tahun 2019. Pasal 86 menyebutkan, ibadah umrah bisa dilakukan secara mandiri meski tetap bisa melalui panitia penyelenggara ibadah umrah (PPIU).

Ketentuan itu sebelumnya tak diatur dalam UU PIHU lama, dan hanya bisa dilakukan melalui PPIU atau pemerintah.

"Kita ingin melindungi seluruh jemaah umrah mandiri atau seluruh jemaah umrah kita maka kita masukkanlah di dalam Undang-Undang untuk memastikan perlindungan terhadap jemaah umrah mandiri," ujarnya beberapa waktu lalu.

Supaya Jemaah umrah mandiri bisa mendapatkan perlindungan seperti harapan pemerintah, maka ada mekanisme perlindungan yang harus dilalui Jemaah. Nantinya, calon jemaah harus terdaftar dan melakukan pemesanan layanan di Saudi Arabia melalui sistem nusuk.

Jemaah umrah mandiri harus terdaftar dengan melaporkan atau melakukan pemesanan hotel kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem Nusuk, nah sistem ini terintegrasi antara Kemenhaj Saudi dengan Kemenhaj Indonesia. Dengan demikian pemerintah Indonesia bisa mendapat data yang benar dan bisa melakukan perlindungan terhadap Jemaah umrah tersebut. (han,rls,ist/lut)



Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania.

MENGUAT! RUMUS UPAH MINIMUM 2026 DIUBAH

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru terkait perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberi sinyal, formula penghitungan upah minimum kemungkinan akan diubah karena dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini serta harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu poinnya, ditegaskan “indeks tertentu’ harus dimaknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta menjamin kebutuhan hidup layak (KHL).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha sedang mengkaji berbagai alternatif rumus penghitungan UMP yang lebih adil.

“Kita sedang memfinalisasi regulasi upah minimum 2026. Bisa saja formulanya berubah. Tujuannya untuk mengurangi disparitas upah antarwilayah dan menjawab tantangan ekonomi terkini,” ujar Yassierli dalam media briefing di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan bahwa regulasi baru ini ditargetkan rampung sebelum 21 November 2025, bertepatan dengan batas waktu pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur. “Permenaker-nya harus selesai sebelum 21 November, karena pada tanggal itu provinsi wajib menetapkan upah minimum,” tegasnya.

Saat ini, dasar perhitungan UMP masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yang menggunakan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (α) dengan rentang 0,10-0,30. Namun, pemerintah menilai rumus tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika ekonomi serta arahan konstitusi.

Kementerian Ketenagakerjaan juga memastikan bahwa penyusunan formula baru tetap berlandaskan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menafsirkan ulang frasa “indeks tertentu” dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

MK menegaskan bahwa “indeks tertentu” harus dimaknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta menjamin kebutuhan hidup layak (KHL).

Putusan MK juga menekankan bahwa penetapan kebijakan pengupahan wajib melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, serikat buruh, dan pengusaha. Artinya, keputusan soal upah minimum tidak bisa sepenuhnya diputuskan oleh pemerintah pusat tanpa partisipasi daerah.

Dinanti Serikat Pekerja dan Dunia Usaha

Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan,



Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang menyebabkan bangunan Pondok Pesantren At-Thohiriyah di Desa Cinengah, Rongga, roboh akibat tanah longsor (Foto: BPBD)

menilai langkah pemerintah meninjau ulang formula upah sangat penting agar tidak bertentangan dengan amanat MK. Ia mengingatkan bahwa dasar hukum penetapan UMP 2026 harus jelas, sebab pemerintah dan DPR diberi waktu dua tahun oleh MK untuk menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. “Kalau masih mengacu pada PP 51/2023 atau formula lama, itu bisa menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, berharap formula baru nantinya dapat diterima oleh semua pihak dan

seimbang antara daya saing industri serta kesejahteraan pekerja. “Yang penting rumus baru ini tetap realistis dengan kondisi ekonomi nasional dan global,” katanya.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan kenaikan UMP maksimal 6,5 persen untuk 2025, melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Para buruh masih menuntut menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%. Bahkan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka para buruh bakal turun ke jalan

mengeglar aksi serempak di seluruh Indonesia, pada tanggal 30 Oktober 2025 nanti. (tin,ist,kcm/dya)

SIMULASI UMP 2026 JIKA ADA KENAIKAN 10,5%

DKI Jakarta:
Rp6.589.579

Papua:
Rp5.233.128

Papua Tengah:
Rp5.233.128

Papua Pegunungan:
Rp5.233.128

Papua Selatan:
Rp5.233.128

Bangka Belitung:
Rp4.733.426

Sulawesi Utara:
Rp4.608.889

Aceh:
Rp4.500.229

Sumatera Selatan:
Rp4.495.289

Sulawesi Selatan:
Rp4.465.931

BSU Resmi Tak Diperpanjang

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak akan diperpanjang tahun ini. Pemerintah telah menuntaskan pencairan bantuan bagi 15,2 juta pekerja penerima manfaat, dan penyaluran tersebut menjadi tahap terakhir dari program BSU 2025.

“Total ada 15,2 juta orang yang sudah menerima BSU. Hingga kini tidak ada rencana penyaluran tahap dua,” ungkap Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Program bantuan ini, lanjutnya, hanya diberikan satu kali dengan besaran Rp600.000 per penerima. Pencairan seluruhnya ditargetkan selesai pada akhir Juli 2025.

Pernyataan tersebut menegaskan kejelasan status program setelah sebelumnya sempat muncul pertanyaan mengenai kemungkinan adanya BSU gelombang lanjutan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, juga menyampaikan hal senada. “Iya, benar. Penyaluran BSU hanya satu kali dengan nilai Rp600.000 per orang,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan hingga 22 Juli 2025, proses penyaluran BSU sudah mencapai 89,71% dari total target 15,95 juta penerima dan diharapkan rampung sepenuhnya pada akhir Juli.

Namun setelah dilakukan verifikasi ulang, jumlah penerima mengalami penyesuaian — dari 17,3 juta menjadi 15,95 juta pekerja, atau berkurang 1,35 juta orang.

Penurunan angka tersebut terjadi karena banyak calon penerima ternyata tidak memenuhi kriteria, seperti tidak aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, memiliki gaji di atas Rp3,5 juta, berstatus Aparatur Sipil Negara

(ASN), atau telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Indah menambahkan bahwa anggaran sisa dari pengurangan penerima akan dikembalikan ke kas negara. Namun, ia tidak menyebutkan berapa nilai dana yang dikembalikan tersebut.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BSU bukan hanya bantuan tunai semata, tetapi juga merupakan wujud komitmen negara untuk menjaga daya beli pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“BSU adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja serta menggerakkan konsumsi rumah tangga agar ekonomi tetap tumbuh,” jelasnya. (gus,rls,ini/dya)

Di Lamongan dan Mojokerto, Jawa Timur, harga GKP kini hanya berkisar Rp6.300–Rp6.500 per kilogram, padahal tiga pekan sebelumnya masih mencapai Rp7.200/kg. “Kalau harga di atas Rp7.000 per kg, petani bisa bernapas lega. Tapi kalau di bawah Rp6.500, jelas rugi,” ujar Bintang Sucipto, anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Lamongan.

Penurunan juga terjadi di Demak, Jawa Tengah, di mana harga GKP yang semula Rp7.200 kini hanya Rp6.700/kg. Menurut Ketua HKTI Demak, Hery Sugiartono, hujan yang terus mengguyur membuat kualitas gabah menurun, sementara permintaan pasar sedang lesu karena stok beras melimpah dan penggilingan padi masih menahan pembelian.

Situasi serupa dialami petani di Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat. Anggota Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Jumair, mengatakan harga GKP turun dari Rp7.300 menjadi Rp7.000 per kg.

“Cuaca, bantuan pangan, dan operasi pasar membuat harga melemah. Namun masih di atas HPP, meski tipis,” ujarnya.

Kondisi paling memprihatinkan terjadi di Aceh Utara, di mana harga gabah jatuh hingga Rp6.200 per kilogram, berada di bawah HPP. Padahal tiga bulan sebelumnya sempat menembus Rp7.500–Rp8.000/kg. “Petani sudah keluar banyak modal, tapi hasil panen justru tak sepadan. Ini membuat generasi muda enggan bertani,” ujar Mukhtarizal, tokoh muda di Kecamatan Pirak Timur.

Mukhtarizal menduga ada permainan pasar yang dilakukan sejumlah penampung gabah. Mereka menyebar isu bahwa gabah musim hujan berkualitas rendah agar bisa membeli dengan harga murah. “Alasan klasik seperti ini tidak bisa dibenarkan. Dulu dengan kondisi sama, harga tetap tinggi,” tambahnya.

Stok Surplus 4 Juta Ton

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun ini karena dalam kondisi surplus beras.

“Tahun 2024 kita impornya beras 4,5 juta ton, tahun 2025 nol, tidak ada kita impor-impor, tapi di gudang kita ada surplus beras sebesar 4 juta ton,” ujar Zulkifli Hasan dilansir dari Antara, Selasa (28/10/2025).

Menurut Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa deregulasi peraturan menjadi kunci dalam menyukseskan Indonesia mencapai surplus beras pada tahun ini.

“Kita pelajari kenapa seperti ini, itu nomor satu regulasi, oleh karena itu kita minta kepada Presiden RI untuk deregulasi,” katanya.

PETANI MERUGI, HARGA GABAH DI BAWAH HPP

Harga gabah kering panen (GKP) di berbagai daerah kembali merosot tajam. Di sejumlah wilayah, harga bahkan anjlok di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan petani karena biaya produksi yang tinggi tidak sebanding dengan hasil penjualan. Penurunan harga gabah kali ini disinyalir disebabkan oleh tingginya curah hujan yang berdampak pada peningkatan kadar air gabah, serta pengetatan pengawasan mutu dan harga beras di tingkat pedagang. Selain itu, operasi pasar, bantuan pangan, dan distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) turut menekan harga di tingkat penggilingan dan konsumen.

(Ilustrasi) Petani saat panen padi di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. (Ist)



Contohnya adalah penyederhanaan aturan distribusi pupuk kepada petani sehingga petani bisa lebih cepat dan mudah mendapatkan pupuk.

Selain itu, pemangkasan aturan terkait irigasi untuk persawahan sehingga pembangunan dan rehabilitasi irigasi saat ini bisa ditangani oleh pemerintah pusat.

Pemerintah juga menetapkan aturan terkait harga pembelian gabah kering panen petani sebesar Rp6.500/kg dalam rangka mendukung kesejahteraan petani. (tin,ant, kcm/dya)

PROVINSI DENGAN HARGA BERAS TERMAHAL (28/10/2025)

Nusa Tenggara Barat	Rp13.950
DI Yogyakarta	Rp14.200
Sulawesi Selatan	Rp14.200
Sulawesi Barat	Rp14.450
Sumatera Utara	Rp14.550
Aceh	Rp14.600
Jawa Timur	Rp14.700
Lampung	Rp14.750
Jawa Barat	Rp14.850
Kepulauan Riau	Rp14.950
Jawa Tengah	Rp15.050

Sumber: www.bi.go.id/hargapangan

DPR RI: Beras di Gudang Bulog Maksimal 6 Bulan

MERESPONS gejala harga gabah dan menjaga kualitas beras nasional, Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog agar stok beras di gudang tidak disimpan lebih dari enam bulan. Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menegaskan pentingnya perputaran cepat stok agar kualitas beras tetap terjaga saat diterima masyarakat.

“Jangan simpan beras terlalu lama, apalagi lebih dari satu tahun. Paling lama enam bulan sudah harus berputar lagi,” ujar Titiek saat meninjau Gudang Bulog Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa (28/10/2025).

Dari hasil pemeriksaan di gudang tersebut, ditemukan sekitar 1.200 ton beras impor dari Pakistan dan 150 ton beras lokal. Beras impor yang disimpan sejak Desember 2024 masih berkualitas baik, namun sebagian beras lokal mengalami kerusakan hingga 25

persen.

Titiek merekomendasikan agar beras lama segera disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sementara beras pecah dapat dicampur dengan beras berkualitas lebih baik untuk bantuan sosial.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah agar stok tidak menumpuk. “Kami targetkan hingga Februari 2026 dapat menyalurkan 1–1,5 juta ton beras, agar saat panen raya Maret 2026 gudang siap menyerap hasil petani,” katanya.

Per 26 Oktober 2025, stok beras nasional mencapai 3,76 juta ton, dengan rincian 257 ribu ton berusia di atas 12 bulan dan 1,13 juta ton berusia 7–12 bulan.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperketat pengawasan mutu dan harga beras

di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah. Ditegaskan akan ada penindakan tegas pelaku usaha yang menjual beras tidak sesuai mutu dan melebihi HET.

“Kalau labelnya premium, mutunya harus premium. Kalau tidak, itu penipuan dan bisa dicabut izin usahanya,” tegas Sri Nuryanti, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas. (wid,ant/dya)

Nasib Perbaikan Jembatan Sonokembang Belum Jelas, Pemkot Malang Sebut Dana Tak Cukup



Jembatan Sonokembang ambrol sejak 10 Oktober 2025, warga swadaya bangun akses sementara terbuat dari bambu. (Santi/Lentera)

MALANG - Pembangunan jembatan Sonokembang yang baru secara permanen belum jelas. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengatakan hambatan keterbatasan dana dari Belanja Tak Terduga (BTT). Diketahui, jembatan di Kelurahan Pandanwangi tersebut, ambrol usai hujan deras pada 10 Oktober 2025 lalu.

Karena keterbatasan tersebut, Pemkot Malang memutuskan untuk mencari solusi sementara agar akses warga tidak terputus. Salah satu langkah yang dipilih adalah dengan menyewa jembatan Bailey yang akan dipasang di lokasi jembatan Sonokembang.

"Diputuskan bahwa kami akan membuat jembatan sementara dengan menyewa jembatan Bailey untuk akses

masyarakat bisa segera dibuka," jelasnya.

Menurut Dandung, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur untuk rencana penyewaan tersebut. Ia menyebut, jangka waktu sewa direncanakan selama delapan bulan, sembari menunggu kesiapan pembangunan jembatan baru.

"Untuk sewanya rencananya delapan bulan. Anggarannya berapa, itu sedang kami hitung. Kemudian kami lakukan pembongkaran jembatan lama dan pembersihan supaya tidak terjadi sumbatan di situ," tambahnya.

Di sisi lain, Dandung juga menyoroti langkah warga yang membangun jembatan sementara dari bambu di atas lokasi jembatan yang ambrol. Ia mengaku memahami kebutuhan masyarakat, namun menegaskan langkah tersebut tidak direkomendasikan karena berpotensi membahayakan keselamatan.

"Kemarin sudah ketemu dengan masyarakat yang membangun jembatan bambu di atasnya. Kami gak bisa melarang, tapi gak

merekomendasikan. Itu bahaya, sudah ada gerongan di dalam pondasi jembatannya, sudah ada yang jebol juga di sana," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua RT 04 Kelurahan Pandanwangi, Khotib Hambali, mengatakan warga terpaksa membuat jembatan darurat secara swadaya karena kondisi mendesak. Warga, kata dia, sudah resah sejak akses utama terputus lebih dari dua pekan.

"Karena ini warga sudah resah. Jembatan ini menjadi satu-satunya akses untuk lewat sini. Dengan jembatan sementara ini semua sudah senang," kata Khotib saat ditemui.

"Sebetulnya gak diizinkan sama Pak Wali Kota. Tutup total memang. Sama Pak Kepala Dinas PUPR-PKP, Pak Lurah, Pak Camat juga gak mengizinkan. Tetapi kami lakukan ini, (sudah) kami antisipasi, kami jaga supaya gak menimbulkan korban," imbuhnya.

Ia menjelaskan, warga juga bergotong royong menjaga keamanan jembatan dengan sistem bergiliran selama 24 jam. (Santi/Dya)

Masih Ada 57 Dapur MBG di Kabupaten Malang Belum Penuhi Standar Keamanan Pangan

MALANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang mencatat, baru 35 dari 92 dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memenuhi standar keamanan pangan. Artinya, 57 lainnya belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinkes setempat.

"Yang sudah ber-SLHS ada 35 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Red), yang sudah dikursus 50 SPPG. Artinya, sudah mengikuti pelatihan penyaji makanan sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi. Sisanya, masih dalam proses pemenuhan persyaratan," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro, Selasa (28/10/2025).

Sementara itu, menurutnya terdapat total 92 SPPG yang ada di Kabupaten Malang. Sebanyak 73 unit telah beroperasi, sementara 19 lainnya masih dalam tahap persiapan.

"Jumlah SPPG yang sudah operasional ada 73 SPPG, dan yang belum operasional 19 SPPG. Total ada

92 SPPG," katanya.

Gunawan menuturkan, percepatan penerbitan SLHS terus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/C/3191/2024 tentang Dukungan Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, percepatan ini juga memperhatikan Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12/05/01/SB.12/09.2025 yang meminta setiap daerah segera melakukan pengurusan SLHS bagi seluruh dapur SPPG penyelenggara program MBG.

"Untuk percepatan ini, Dinas Kesehatan diberikan kewenangan menerbitkan sertifikat SLHS tanpa melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) Dinas Perizinan," ungkap Gunawan.

Ditambahkannya, SLHS menjadi bukti resmi bahwa sebuah dapur SPPG telah memenuhi standar kebersihan,

sanitasi, serta pengolahan makanan yang ditetapkan pemerintah.

Sertifikasi ini, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya pengendalian risiko dalam penyelenggaraan makanan bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah penerima program MBG.

"SLHS penting dan berfungsi sebagai bentuk upaya dalam pengendalian risiko, landasan hukum, bukti kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan efektif, serta peningkatan kualitas usaha. SLHS kita berikan kalau SPPG sudah memenuhi kelengkapan persyaratan," terangnya.

Dinkes Kabupaten Malang juga mengimbau seluruh yayasan penyelenggara SPPG agar segera meng-



Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro. (dok. inst/dppkbbmalang)

ajukan sertifikasi. Serta melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

Gunawan mengingatkan, kepemilikan SLHS tidak serta-merta menjamin bebas dari risiko keracunan, namun dapat meminimalkan potensi terjadinya gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak higienis. (Santi/Dya)

VIETNAM TERAPKAN LARANGAN MOTOR BENSIN TAHUN 2026

Vietnam akan memberlakukan larangan penggunaan sepeda motor berbahan bakar bensin di area pusat kota mulai tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan kualitas udara yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih sehat.

Aturan tersebut ditetapkan oleh Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Berdasarkan laporan The Independent, mulai 1 Juli 2026, sepeda motor bermesin bensin tidak lagi diperbolehkan beroperasi di sejumlah ruas jalan utama di Hanoi dan Ho Chi Minh City.

Kebijakan tersebut diumumkan tak lama setelah India memutuskan untuk membatalkan rencana pelarangan pengisian bahan bakar bagi kendaraan berusia tua. Mulai Januari 2028, pemerintah Hanoi berencana memperluas larangan serupa ke kawasan lain sekaligus membatasi penggunaan mobil pribadi berbahan bakar bensin.

Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik dan menjadikan kota lebih ramah lingkungan. Motor listrik dinilai mampu menjadi solusi efektif dalam mengurangi tingkat polusi udara di Negeri Naga Biru.

Selain itu, pemerintah berupaya mempercepat transisi menuju penggunaan motor listrik buatan VinFast, produsen otomotif lokal yang saat ini menguasai sekitar 24 persen pangsa pasar kendaraan listrik (EV) di dalam negeri. Namun, jumlah motor listrik yang beroperasi masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mobil listrik.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 60 ribu kematian setiap tahun di Vietnam terkait dengan polusi udara. Pada Juli 2025, indeks kualitas udara di sejumlah kota tercatat berada pada kisaran 115 hingga 165, yang dikategorikan sebagai 'buruk' hingga 'sangat buruk'.

Sebagai informasi, mayoritas dari hampir 8,7 juta penduduk Hanoi mengandalkan motor untuk kegiatan sehari-hari. Kota ini memiliki sekitar tujuh juta sepeda motor dan lebih dari satu juta mobil.

Seiring meningkatnya pendapatan, semakin banyak orang beralih ke kendaraan pribadi. Akibatnya, kualitas udara memburuk dan Hanoi terus masuk dalam daftar kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.

Adapun, rencana itu tak sepenuhnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Sebagian besar masih ragu untuk beralih ke motor listrik dengan alasan harga yang tinggi serta infrastruktur stasiun pengisian daya yang terbatas.

Selain melarang kendaraan,



Orang-orang mengendarai sepeda motor di depan rumah-rumah tua yang sedang dihancurkan di Hanoi (6/1/2025). (Foto: AFP)

pemerintah Vietnam berencana memperbaiki sistem pengolahan limbah, menerapkan pemantauan lingkungan berbasis digital, dan

memperketat sanksi bagi pelanggar. Warga yang melaporkan kasus pencemaran akan diberikan imbalan. (Reuters, AP, ist/nei)

Rencana Besar RI Kurangi Ketergantungan Energi Fosil

INDONESIA tengah menyiapkan langkah besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Upaya diversifikasi energi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Regulasi ini memuat arah kebijakan energi jangka panjang hingga tahun 2060. Dokumen tersebut baru saja disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 September 2025, menandai komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Dikutip dari beleid tersebut, Selasa (28/10/2025), disebutkan pemerintah menyatakan akan menjalankan program diversifikasi atau peralihan penggunaan energi guna mendorong konservasi sumber daya energi, memperkuat kemandirian energi, serta meningkatkan ketahanan energi di tingkat nasional maupun daerah.

Pada pasal 31 ayat 2 disebutkan ada 6 poin yang bakal dilaksanakan mulai saat ini hingga 2060. Pertama, transisi penyediaan dan pemanfaatan dari energi tak

terbarukan ke berbagai jenis sumber energi baru dan sumber energi terbarukan.

Kedua, pengalihan energi di sektor transportasi dari bahan bakar minyak (BBM) ke penggunaan listrik, bioenergi, hidrogen, gas, dan energi rendah karbon lainnya.

Ketiga, pengalihan penggunaan gas liquefied petroleum gas (LPG) untuk keperluan rumah tangga dan komersial ke penggunaan biogas, gas dimethyl ether (DME), induksi listrik, atau energi rendah karbon lainnya.

Keempat, akan dilaksanakan pengalihan penggunaan sebagian batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap ke penggunaan pembangkit listrik berbasis gas, hidrogen, amonia, biomassa, dan energi rendah karbon lainnya.

Kelima, pengalihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas ke penggunaan biomassa dan biogas, listrik, hidrogen, dan energi rendah karbon lainnya untuk penggunaan energi bagi industri besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal yang sama juga dilakukan untuk sektor komersial dan rumah tangga.

Keenam, pemenuhan sebagian

DAMPAK LARANGAN MOTOR BENSIN

- **Ekonomi & Industri:**
Produsen Jepang berisiko rugi besar dan sebagian bisa terancam bangkrut akibat larangan motor bensin.
- **Lapangan Kerja:**
Ratusan ribu pekerja di sektor otomotif berpotensi kehilangan pekerjaan karena peralihan ke motor listrik.
- **Diler & Pemasok:**
Sekitar 2.000 diler dan 200 pemasok akan terdampak oleh penurunan penjualan dan permintaan komponen mesin bensin.
- **Konsumen:**
Harga motor listrik masih mahal sementara infrastruktur pengisian daya masih sangat terbatas.
- **Lingkungan:**
Polusi udara di kota besar diharapkan menurun seiring berkurangnya kendaraan bermesin bensin.
- **Hubungan Internasional:**
Kebijakan ini berpotensi memicu ketegangan diplomatik dengan Jepang sebagai negara produsen utama.
- **Infrastruktur:**
Pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan pengisian daya dan ekosistem pendukung motor listrik.



keperluan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas ke penggunaan likuifikasi dan gasifikasi batu bara yang dihasilkan menggunakan teknologi rendah karbon dengan memperhatikan keekonomian.

Dalam pasal 12 disebutkan pengurangan energi minyak bumi akan dilakukan dalam beberapa tahap. Di tahun 2030 hingga 2040 bauran energinya ditekan ke 22,4-26,3%, kemudian di 2040 hingga 2050 dikurangi menjadi hanya 14,3%-15,9%.

Lalu dari 2050 hingga 2060 dikurangi lagi menjadi hanya 8,7-8,8%. Target utamanya lebih dari tahun 2060 bauran energi minyak bumi hanya menyentuh 3,9-4,7%.

Di pasal yang sama, penggunaan batu bara juga dikurangi bertahap. Di rentang 2030 hingga 2040 bauran energinya akan ditekan menjadi hanya 40,7-41,6%, berlanjut ke 2040-2050 dikurangi kembali menjadi hanya 28,9-31,07%. (IEA, Beleid, ist/nei)

PELAJARAN DARI KIM KARDASHIAN, KENALI GEJALA ANEURISMA OTAK SEJAK DINI

Baru-baru ini, Kim Kardashian mengumumkan bahwa ia mengidap aneurisma otak, dunia hiburan dikejutkan oleh kenyataan bahwa penyakit ini bisa menyerang siapa saja—bahkan mereka yang tampak sehat dan berenergi. Di balik sorotan kamera, kisah ini membuka jendela penting untuk memahami salah satu gangguan pembuluh darah otak yang paling berbahaya namun sering kali tidak menimbulkan gejala apa pun hingga saat kritis.

Menurut laporan, Kim Kardashian mengakui bahwa stres memang menjadi bagian besar dalam hidupnya belakangan ini. Dalam beberapa adegan, pendiri SKIMS itu terlihat menangis, mulai dari kesulitan dalam ujian advokat sekolah hukumnya, hingga saat membahas perpisahannya dengan Kanye “Ye” West, ayah dari keempat anaknya.

“Saya senang ini sudah berakhir,” kata Kim dengan suara bergetar. “Mantan saya akan tetap ada dalam hidup saya apa pun yang terjadi. Kami punya empat anak bersama.” Ia juga mengaku sempat bertanya-tanya pada dirinya sendiri, “Kenapa sih ini terjadi?”

Apa Itu Aneurisma Otak?

Aneurisma adalah kondisi ketika arteri membengkak seperti balon akibat dinding pembuluh darah yang melemah. Aneurisma dapat terjadi di berbagai bagian tubuh, namun paling sering ditemukan di aorta dan otak.

Jika aneurisma pecah, hal ini bisa menyebabkan stroke, kerusakan otak, koma, atau bahkan kematian. Meski terdengar menakutkan, tidak semua aneurisma berbahaya. “Aneurisma lebih umum daripada yang Anda kira,” kata Nina Moore, dokter ahli bedah saraf dari Cleveland Clinic, dikutip dari NBC News.

Menurutnya, banyak orang bisa hidup seumur hidup tanpa gejala atau komplikasi apa pun. “Sebagian besar aneurisma tidak menunjukkan gejala, kecuali jika menekan saraf atau mengalami perubahan bentuk,” ungkapnya.

Asosiasi Jantung Amerika memperkirakan 3 hingga 5 persen populasi AS menderita aneurisma otak.

Sementara itu, dokter Laura Stein dari Icahn School of Medicine at Mount Sinai menjelaskan bahwa kondisi ini lebih sering dialami perempuan, terutama setelah menopause. Faktor risikonya meliputi riwayat keluarga, tekanan darah tinggi, merokok, dan peradangan.

Penyebab

Tidak ada penyebab tunggal aneurisma otak, tetapi penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara faktor genetik, gaya hidup, dan kondisi medis tertentu berperan besar.

Faktor Genetik

Kelainan bawaan pada jaringan ikat—seperti sindrom Ehlers-Danlos atau Marfan—dapat menyebabkan dinding pembuluh darah lebih rapuh.

Riwayat keluarga dengan aneurisma juga meningkatkan risiko dua hingga empat kali lipat.

Hipertensi dan Aterosklerosis

Tekanan darah tinggi kronis memperlemah lapisan dalam pembuluh darah (endotel), memicu mikro-robekan yang berkembang menjadi aneurisma. Kolesterol tinggi turut mempercepat proses ini.

Kebiasaan Hidup Tidak Sehat

Merokok menjadi faktor risiko paling kuat yang bisa dikontrol. Nikotin mempersempit pembuluh darah dan merusak elastisitas dinding arteri. Alkohol berlebih dan penggunaan obat terlarang seperti kokain juga memperparah kerusakan vaskular.

Stres Berat dan Hormon

Dalam kasus seperti Kim Kardashian, stres ekstrem disebut menjadi pemicu potensial. Secara fisiologis, stres kronis memicu peningkatan kadar hormon kortisol dan adrenalin, yang meningkatkan tekanan darah dan beban pada sistem pembuluh darah otak. Walaupun hubungan langsungnya masih diperdebatkan, banyak studi menunjukkan bahwa lonjakan tekanan darah akibat stres akut dapat menjadi “pematik” pada pembuluh yang sudah lemah.

Gejala

Gejala yang muncul dibedakan berdasarkan tingkat keparahan penyakit yang dialami oleh pengidap. Dua jenis tersebut adalah aneurisma otak tidak pecah dan aneurisma otak pecah. Berikut penjelasannya masing-masing:

Aneurisma Otak Tidak Pecah

Aneurisma otak tidak pecah umumnya tidak menimbulkan gejala pada pengidap. Gejala baru akan muncul ketika ukuran aneurisma semakin membesar dan menekan jaringan saraf dalam otak. Beberapa gejala aneurisma otak dapat muncul secara bertahap seiring dengan membesarnya tonjolan pada pembuluh darah.

Penderita mungkin mengalami masalah penglihatan, seperti kehilangan penglihatan sebagian atau penglihatan ganda, disertai rasa sakit di atas atau di sekitar mata akibat tekanan pada saraf optik. Dalam beberapa kasus, muncul mati rasa atau kelemahan pada satu sisi wajah, serta kesulitan berbicara karena gangguan pada area otak yang mengatur fungsi motorik dan bahasa. Sakit kepala juga

sering menjadi keluhan awal yang menetap atau terasa tajam di satu sisi kepala.

Selain itu, penderita dapat mengalami kehilangan keseimbangan, kesulitan berkonsentrasi, dan gangguan pada ingatan jangka pendek, menandakan adanya tekanan atau kerusakan pada bagian otak yang berperan dalam koordinasi dan fungsi kognitif.

Aneurisma Otak Pecah

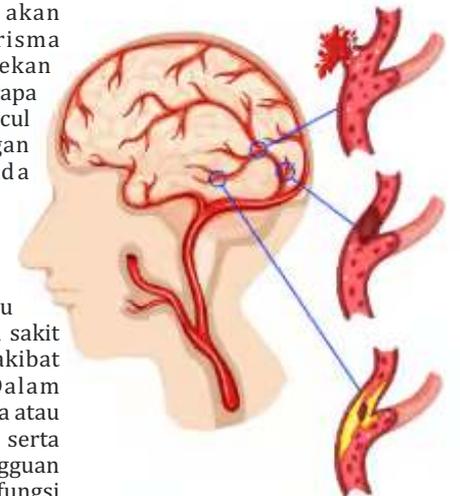
Gejala aneurisma otak pecah dimulai dari sakit kepala yang terjadi secara tiba-tiba dan sangat menyiksa. Rasa sakitnya ibarat dipukul benda tumpul dan terasa sangat nyeri.

Ketika aneurisma otak pecah, gejalanya biasanya muncul secara tiba-tiba dan parah. Penderita dapat mengalami hilang kesadaran atau kejang-kejang akibat aliran darah yang keluar ke jaringan otak. Rasa sakit yang hebat, terutama pada kepala, sering menjadi tanda pertama yang mengkhawatirkan.

Selain itu, penglihatan kabur atau ganda dapat terjadi karena tekanan pada saraf penglihatan, disertai kebingungan mendadak yang menandakan gangguan fungsi otak.

Leher terasa kaku atau nyeri muncul akibat iritasi pada selaput otak, dan sering kali diikuti penurunan sensitivitas terhadap cahaya atau fotofobia.

Dalam beberapa kasus, pasien juga mengalami kelemahan pada salah satu sisi tubuh atau anggota tubuh tertentu, mencerminkan terjadinya gangguan neurologis akibat perdarahan di area otak yang mengatur gerakan. (nei,ist/dya)



NIKE BAWA TEKNOLOGI KE LEVEL BARU LEWAT SEPATU BERTENAGA AMPLIFY

Perusahaan alas kaki ternama Nike baru saja memperkenalkan inovasi terbarunya yang dinamakan Amplify, sebuah proyek ambisius yang diklaim sebagai sistem alas kaki bertenaga pertama di dunia. Teknologi ini dirancang untuk merevolusi cara orang berjalan dan berlari dengan menggabungkan kekuatan desain ergonomis, teknologi sensor canggih, serta dukungan energi mekanis yang responsif terhadap setiap langkah penggunaannya.

Melalui proyek Amplify, Nike berupaya menghadirkan pengalaman bergerak yang lebih cepat, efisien, dan menyenangkan dalam aktivitas sehari-hari. Inovasi ini tidak hanya menonjolkan aspek performa, tetapi juga memberikan kenyamanan maksimal bagi pemakainya. Dengan konsep futuristik ini, Nike semakin mempertegas posisinya sebagai pemimpin dalam industri inovasi alas kaki global yang terus mendorong batas antara teknologi dan gaya hidup aktif.

Seperti sepeda listrik (e-bike) yang memberikan bantuan kepada penggunaannya saat mengayuh, Project Amplify menggunakan sistem robotik ringan untuk meningkatkan kecepatan berjalan dan berlari dari pengguna. Produk generasi pertama ini dikembangkan Nike bersama perusahaan robotik Dephy.

Dalam keterangan tertulis, Nike mengatakan bahwa sepatu ini tidak dirancang untuk pelari kompetitif yang ingin memangkas detik dari waktu tempuh mereka. "Melainkan untuk menyediakan bagi atlet yang ingin menjadi lebih cepat dan mencapai jarak lebih jauh dengan usaha yang lebih sedikit, dengan memberi mereka tambahan tenaga



untuk aktivitas sehari-hari. Layaknya sepasang otot betis tambahan," kata Nike, Kamis (23/10/2025).

Dari segi desain, Project Amplify tampil futuristik namun tetap fungsional. Wujudnya menyerupai penyangga pergelangan kaki berteknologi tinggi yang dilengkapi dengan motor mini, sabuk penggerak, dan baterai isi ulang yang tersembunyi dalam bentuk ramping dan ergonomis. Teknologi ini dirancang agar dapat menyesuaikan dengan gerakan alami kaki, memberikan dorongan tambahan setiap kali pengguna melangkah.

Nike menargetkan produk ini untuk "atlet" sebutan yang digunakan perusahaan untuk menggambarkan

siapa pun yang aktif bergerak, baik pelari profesional maupun individu yang berlari dengan kecepatan sekitar 10 hingga 12 menit per mil.

Nike mengungkapkan bahwa pengembangan Project Amplify telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir, dengan melibatkan lebih dari 400 atlet dari berbagai latar belakang untuk menguji kenyamanan, daya tahan, dan efisiensinya.

Uji coba intensif ini menjadi bagian dari komitmen Nike dalam menciptakan inovasi berbasis riset yang benar-benar menjawab kebutuhan pengguna di dunia nyata. Saat ini, proyek tersebut masih berada dalam tahap

pengujian lanjutan sebelum akhirnya dirilis ke pasaran dalam beberapa tahun mendatang.

Selain memperkenalkan Amplify, Nike juga memamerkan serangkaian inovasi baru yang menunjukkan arah masa depan industri olahraga. Beberapa di antaranya termasuk alas kaki berbasis ilmu saraf, yang menyesuaikan tekanan dan dukungan sesuai aktivitas otak pengguna, serta teknologi pendingin canggih untuk pakaian olahraga yang membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil saat beraktivitas intens. Melalui inovasi-inovasi ini, Nike semakin menegaskan visinya untuk memadukan teknologi, performa, dan kenyamanan dalam satu ekosistem gaya hidup. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

RAHASIA TAMPIL PROFESIONAL LEWAT PILIHAN TAS YANG TEPAT

Tas kerja bukan hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan barang, tetapi juga menjadi bagian dari identitas profesional seseorang. Di tengah gaya kerja modern yang serba cepat dan dinamis, tas kantor berperan penting dalam menjaga keteraturan, efisiensi, dan penampilan. Saat seseorang membawa tas yang sesuai dengan kebutuhannya, kesan yang ditampilkan bukan hanya rapi secara visual, tetapi juga menunjukkan bahwa ia terorganisir dan siap menghadapi rutinitas kerja yang padat.

Dalam konteks ini, tas kantor berperan layaknya rekan kerja yang setia. Ia membantu membawa semua perlengkapan penting—mulai dari laptop, dokumen, hingga kebutuhan pribadi—tanpa menambah beban berlebih. Bagi banyak profesional, tas bukan sekadar pelengkap gaya, melainkan perpaduan antara fungsi dan estetika, yang mendukung aktivitas sehari-hari dengan tetap memperhatikan penampilan.

Meski begitu, memilih tas kantor yang ideal tidak selalu mudah. Beragam model, bahan, dan desain yang tersedia di pasaran sering kali membuat seseorang bingung menentukan pilihan terbaik. Apakah sebaiknya memilih tas kulit berdesain klasik yang elegan, atau tas berbahan nilon ringan dengan banyak kompartemen? Semua kembali pada gaya hidup dan tuntutan pekerjaan masing-masing individu.

Prioritaskan Kerapian dan Fungsi

Tas kantor yang baik tidak hanya berfungsi sebagai wadah, tetapi juga membantu menjaga

kerapian dan keamanan barang-barang di dalamnya. Pilihlah tas yang dilengkapi dengan kompartemen laptop berlapis busa untuk melindungi perangkat dari benturan, serta kantong berresleting guna menyimpan barang berharga seperti dompet atau kunci. Selain itu, keberadaan slot khusus untuk pena, kartu, dan dokumen penting akan memudahkan dalam menjaga segala kebutuhan kerja tetap tertata dengan rapi.

Perhatikan Kualitas dan Ketahanan

Kualitas bahan dan konstruksi menjadi faktor utama yang menentukan daya tahan dan umur sebuah tas. Pilihlah tas yang terbuat dari kulit asli, kanvas tebal, atau nilon premium, karena ketiga bahan tersebut dikenal kuat, tahan lama, dan tidak mudah pudar meski sering digunakan. Selain itu, jahitan yang rapi serta logam pengait yang kokoh menunjukkan bahwa tas tersebut dibuat dengan tingkat ketelitian tinggi dan perhatian pada detail.

Sesuaikan dengan Gaya dan Lingkungan Kerja

Tas kantor bukan sekadar wadah untuk membawa perlengkapan kerja, tetapi juga cerminan gaya pribadi dan profesionalisme seseorang. Pemilihan model, bahan, dan warna tas dapat menggambarkan karakter serta posisi seseorang di tempat kerja. Karena itu, penting untuk memilih tas yang tidak hanya fungsional, tetapi juga sesuai dengan citra yang ingin kamu tampilkan.

U n t u k lingkungan kerja yang formal, seperti dunia

perbankan atau korporat, tas kulit dengan desain minimalis dan berstruktur tegas menjadi pilihan ideal. Tas jenis ini memberikan kesan elegan, rapi, dan berwibawa, sejalan dengan etika berpakaian profesional yang diterapkan di industri tersebut.

Pilih Ukuran Sesuai Kebutuhan

Ukuran tas sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah barang yang dibawa. Tas berukuran kecil (13–15 inci) cocok untuk pekerja digital yang hanya membawa laptop dan beberapa dokumen penting.

Sementara itu, tas berukuran sedang (15–17 inci) lebih sesuai bagi profesional yang sering bepergian untuk presentasi atau membawa banyak berkas kerja. Adapun tas besar (17 inci ke atas) ideal digunakan oleh konsultan atau eksekutif yang membutuhkan ruang ekstra untuk menyimpan berbagai perangkat, dokumen, serta perlengkapan kerja lainnya.

Desainnya Simple

Berikutnya ketika memilih tas untuk kerja baiknya hindari desain yang mencolok. Karena sebagai gantinya Anda bisa memilih tas kerja lebih sederhana atau punya desain minimalis agar tetap memberikan kesan profesional. Tas dengan desain simple memberikan tampilan lebih praktis dan bisa tunjukkan kesan profesional. Sementara untuk desain polos akan memberikan penampilan makin menarik dibanding jika terlalu banyak aksesoris.

Mengenai pilihan modelnya sendiri hadir dengan beragam bentuk serta gaya. Seperti tas tangan dengan pegangan sampai ransel yang dapat Anda sesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Warna Netral

Baiknya hindari pemakaian work bag yang warnanya terlalu mencolok atau mewah. Sebab hal itu justru bisa membuat tampilannya jadi kurang profesional, jadi baiknya pilih warna netral saja.

Sehingga Anda bisa lebih gampang ketika ingin memadupadankan dengan outfit kantor tiap harinya. Pilih produk yang warnanya netral, misalnya putih, hitam, abu, cokelat, atau kombinasi itu semua.

Sesuaikan juga warnanya dengan pakaian agar tampilannya semakin selaras. Jadi nantinya tidak kesulitan mencocokkan outfit karena sangat cocok untuk dipakai semua warna baju.

Memilih tas kantor bukan hanya soal penampilan, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan dan efektivitas dalam bekerja setiap hari. Tas yang tepat membantu kamu tampil lebih profesional, menjaga kerapian, serta mendukung mobilitas tinggi dengan rasa percaya diri.

Sebelum memutuskan untuk membeli, ada baiknya kamu mempertimbangkan fungsi, kualitas, dan desain tas tersebut. Sebab, tas yang ideal bukan sekadar pelengkap gaya, melainkan mitra dalam perjalanan karier yang mencerminkan kesiapan dan semangat menuju kesuksesan. (nei,ist/dya)



Rencana Penggunaan B50 ...dari hal 1

Untuk mewujudkan target itu, menurut Bahlil, pemerintah akan meningkatkan kapasitas produksi FAME dari 15,6 juta kiloliter pada 2025 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026. Peningkatan ini tak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga berdampak luas terhadap ekonomi nasional.

Sektor hulu sawit dan industri pengolahan biodiesel diperkirakan mampu menyerap hingga 2,5 juta tenaga kerja di perkebunan dan 19 ribu pekerja di pabrik pengolahan. "Kebijakan mandatori B50 menjadi bagian dari visi pemerintah dalam menciptakan new economic order atau arah baru perekonomian Indonesia yang berlandaskan pada pemanfaatan sumber daya dalam negeri," jelas Bahlil.

Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan keseriusan untuk tidak hanya menggali potensi energi terbarukan, tetapi juga mengeksekusi kebijakan nyata yang memperkuat ketahanan ekonomi dan menjamin kemandirian energi nasional.

Di satu sisi, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI,) Eddy Martono mengatakan jika ada kewajiban menaiki DMO untuk dalam negeri, maka sudah pasti ini akan ada hubungannya semua dengan masalah.

Ia menjelaskan, jika kebutuhan DMO ditingkatkan maka yang menjadi korban adalah pengusaha karena otomatis harga minyak sawit dalam negeri akan tertekan. Tidak hanya itu, tandan buah segar (TBS) di petani juga akan menurun karena kebutuhan DMO dalam negeri.

"Kalau begitu nanti harga CPO tertekan, dengan kondisi seperti ini, ya pasti nanti akan itu menurunkan harga TBS petani," katanya di Kantor GAPKI, Jakarta, Selasa (28/10/2025) dilansir dinancedetik.

Dia menandakan bahwa saat ini harga CPO dunia untuk kontrak bulan Oktober sebesar 4.312 ringgit atau sekitar Rp 17,04 juta per ton berdasarkan data barchart pada Selasa 28 Oktober 2025.

Sebelumnya, Kompartemen Hubungan Stakeholders Bidang Sustainability GAPKI, Agam Fatchurrochman mengatakan rencana ini akan mengakibatkan ekspor sawit Indonesia anjlok dan juga program peremajaan sawit rakyat bakal terhenti.

"Kami di industri sawit ini sebenarnya sudah melihat bahwa dinaikannya dari B40 menjadi B50 ini tidak sehat. Tidak sehat bagi pasar, tidak sehat bagi BPDPKS, ekspor Indonesia akan anjlok dan peremajaan sawit rakyat bisa berhenti

dan segalanya," ujar Agam.

Menurut Agam daripada memaksakan peningkatan kadar campuran biodiesel, pemerintah sebaiknya mendorong pengembangan bioenergi menjadi biometana.

Biometana merupakan energi bersih yang dihasilkan dari limbah pertanian, residu industri, dan kotoran ternak. Hal ini dikarenakan pengelolaan limbah produktif yang menekan emisi metana dan meningkatkan ekonomilokal.

"Jadi lebih baik kalau bisa B40 diturunkan, tetapi yang didorong adalah bioenergi atau biometana ini," kata Agam.

Sementara itu, mengutip data GAPKI sepanjang Januari-Juli 2025, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel domestik tercatat sudah mencapai 7,23 juta ton, naik dari periode sama tahun 2024 yang tercatat sebanyak 6,44 juta ton. Sepanjang tahun 2024, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel mencapai 11,44 jutaton.

Sedangkan untuk ekspor, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel pada periode Januari-Juni 2025 tercatat nol alias tidak ada. Sedangkan sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 73.000 ton.

Di sisi lain, konsumsi minyak sawit untuk pangan domestik sepanjang Januari-Juli 2025 tercatat mencapai 5,77 juta ton, naik tipis dari periode sama tahun 2024 yang sebanyak 5,76 juta ton. Sepanjang tahun 2024 volumenya mencapai 10,20 juta ton.

Kekhawatiran juga menerpa sejumlah asosiasi pengusaha tambang. Bahkan mereka meminta pemerintah membatalkan rencana penerapan B50 pada 2026. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya produksi di tengah turunnya harga komoditas tambang dan meningkatnya biaya operasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan industri tambang sebenarnya telah mengikuti seluruh tahapan kewajiban penggunaan biodiesel sejak program B10, B20, B30, hingga B35. Namun, penerapan B40 yang mulai berjalan pada Januari 2025 menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

"Pada awalnya ada kekhawatiran terkait dampaknya terhadap mesin dan alat berat, karena belum ada produsen alat berat di dunia yang memberikan garansi penggunaan biodiesel di atas B10," kata Hendra dilansir tempo, Senin (27/10/2025).

Selain itu, ia mengatakan pencabutan subsidi untuk penggunaan biodiesel non-PSO (Public Service Obligation) sejak penerapan B40 telah menambah beban biaya perusahaan tambang. Jika

pemerintah melanjutkan ke tahap biodiesel B50, beban itu akan semakin berat.

"Tren harga komoditas, kecuali emas, sejak 2024 cenderung menurun. Sementara biaya operasional terus meningkat akibat kenaikan tarif royalti dan kewajiban perpajakan lainnya," katanya.

Penolakan B50 juga datang dari petani sawit. Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap pasokan bahan baku industri pangan, keseimbangan keuangan Dana Perkebunan (BPDP), serta kesejahteraan petani sawit rakyat.

"Kenaikan B50 akan mengganggu pasokan untuk industri pangan. Peningkatan campuran biodiesel hingga B50 akan meningkatkan serapan CPO (Crude Palm Oil/ minyak sawit mentah) di sektor energi, sehingga pasokan untuk industri pangan berkurang," katanya, Senin (27/10/2025).

Dia menambahkan, masih adanya stok tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan mandatory B50.

Meski B50 diarahkan memaksimalkan penggunaan brondolan sawit (buah kelapa sawit yang panen mentah/ busuh, berjatuh di sekitar pohon). Memang, imbuhnya, brondolan dapat dikelola dan digunakan untuk biodiesel. Sehingga, petani tidak merugi karena tidak ada panen atau tandan buah segar (TBS) yang terbuang dibuang.

Hanya saja, sambungnya lagi, kapasitas B50 terlalu besar, sehingga tetap akan mmebantunya mencegah terjadinya gangguan di rantai pasok.

"Kalau konsumsi sawit untuk biodiesel terus dinaikkan, otomatis pasokan untuk industri minyak goreng dan pangan akan menipis. Ini akan menekan pelaku industri dan masyarakat karena harga minyak makan bisa naik lagi. Pemerintah perlu hati-hati dan tidak hanya melihat sisi energi," kata Mansuetus dilansir dari cncbincindonesia.

"Harga CPO akan naik. Sementara, banyak yang buat (produsen) minyak goreng yang tidak punya kebun. Mereka akan beli CPO, harga minyak goreng bisa terganggu. DMO (domestic market obligation/ wajib pemenuhan dalam negeri)," ucapnya.

Belum lagi, imbuhnya, subsidi biodiesel akan membengkak dan mengorbankan program petani. "Hal ini akan memperkecil porsi dana untuk program petani seperti replanting (peremajaan sawit rakyat), sarana prasarana, dan penguatan SDM. Selama ini hampir 90% dana BPDP digunakan untuk subsidi biodiesel, sementara program bagi petani hanya

sekitar 8%. Kalau subsidi terus ditambah, nasib petani makin terpinggirkan," katanya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani. Ia menilai kebijakan biodiesel memang perlu ditinjau kembali karena berdampak langsung terhadap efisiensi industri tambang. Sebab dengan B40 saja, biaya produksi sudah meningkat cukup signifikan. Terlebih lagi ketika subsidi yang dihapus sejak B40 membuat seluruh tambahan biaya harus ditanggung perusahaan.

Ia menambahkan tidak semua alat berat di sektor pertambangan kompatibel dengan bahan bakar biodiesel tinggi. Penggunaan B40, ia melanjutkan, kerap memunculkan kendala teknis seperti frekuensi penggantian filter yang lebih sering dan penyesuaian sistem mesin.

Terkait dengan program B50, analisis kebijakan dari lembaga Cerah, Sartika Nur Shalati menilai program biodiesel B50 berpotensi mendorong perluasan lahan sawit hingga tiga kali lipat dari luas eksisting sekitar 16 juta hektare. "Swasembada energi penting, tapi kalau mengorbankan hutan dan memperlambat transisi energi, itu langkah yang keliru," ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar IPB Bayu Krisnamurthi mengingatkan agar pemerintah berhati-hati sebelum menerapkan B50. Menurut dia, peningkatan kadar campuran dari B40 ke B50 bisa menambah beban subsidi, menekan ekspor CPO, serta memicu kenaikan harga minyak goreng. "Kalau tidak hati-hati, daya saing industri sawit bisa turun," kata Bayu.

Berdasarkan simulasi, program B50 memang dapat menghemat devisa impor solar hingga Rp 172 triliun, namun potensi kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp 190 triliun. "Perlu keseimbangan antara target energi, ekspor, dan kesejahteraan petani. Sawit Indonesia luar biasa kuat, tapi jangan sampai kita sendiri yang membuatnya kalah," kata Bayu.

Disatu sisi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah tengah memikirkan beberapa opsi untuk pemenuhan pasokan CPO guna mengamankan program B50 pada tahun depan, termasuk salah satunya yaitu terkait opsi DMO. Opsi lainnya, lanjutnya, yaitu dengan mengurangi ekspor CPO.

"Ini kan persoalannya adalah kalau kita memakai B50, tinggal ekspor (CPO) kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Termasuk dalamnya adalah DMO (CPO)," jelas Bahlil di sela acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025) dilansir cncbincindonesia. (han,ant,ist/lut)

CORETAX BERNILAI RP1,228 TRILIUN, TAPI BERANTAKAN

Platform pelaporan pajak Coretax masih bermasalah dan banyak dikeluhkan warga RI. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Coretax berantakan dan belum bisa dibenahi. Dia juga mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada Coretax yang bernilai Rp1,228 triliun tersebut.

Kemarin Coretax berantakan, kita coba perbaiki dalam waktu cepat. Jangka sebulan enggak selesai rupanya, tapi kita menuju ke arah sana," tutur Purbaya dilansir *cnnIndonesia*, Selasa (28/10/2025).

Sistem perpajakan Coretax awalnya ditargetkan mulai digunakan wajib pajak pada Januari 2025 lalu. Namun, terjadi sejumlah masalah pada platform yang dikembangkan oleh kontraktor asing tersebut. Alhasil, perbaikan yang semula ditargetkan selesai satu bulan, menjadi molor.

"Error artinya masih belum sempurna. Tapi kalau kita lihat, jadi ada beberapa layer, yang di upper layer ya, itu beberapa efek seperti sering time out, tidak bisa login, setelah login tidak bisa melanjutkan pekerjaan, karena di dalamnya terjadi time out," ujar Purbaya, dilansir *cnnIndonesia*.

Purbaya mengungkapkan sejumlah persoalan Coretax yang terjadi. Mulai dari pemerintah tidak bisa mengakses perangkat lunak yang dikendalikan oleh perusahaan asal Korea Selatan, LG sebagai kontraktor. Sebab, Kemenkeu belum memiliki kode sumber (*source code*) dari sang kontraktor.

Purbaya mengatakan masih ada bagian-bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG, sehingga akses untuk masuk ke perangkat lunak itu belum diberikan. Selain itu, LG juga masih mengerjakan itu. Sehingga akses tersebut baru akan diberikan pada Desember. Meski demikian, Kemenkeu terus berusaha menangani pada bagian yang ditangani.

Purbaya menantikan permasalahan Coretax akan rampung pada Februari 2026 mendatang. "Saya bilang satu bulan (bisa perbaiki), tapi karena kendala tadi kita gak bisa masuk, karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun 4 tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya," ujarnya.

Kendala juga dihadapi pihak pemerintah karena pihak LG kerap tidak responsif terhadap permintaan pemerintah. "Jadi sebelumnya LG itu, sebelum kita jalankan tim special task force ini, mereka itu kalau ditanya, gak peduli. Ditanya disana, cuek dan, responnya lama," ujarnya.

Terkait dengan respon dari LG tersebut, Purbaya mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk memutuskan kontrak tersebut,



Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui Coretax bermasalah sehingga banyak mengundang komplain dari Wajib Pajak. (Foto: KLI Kemenkeu)

sehingga tidak lagi tergantung dengan pihak asing. "On techniques, adanya ketergantungan pada pihak asing, nanti ke depan akan kita putus, apalagi kualitas jelek seperti itu," ujarnya.

Terlebih lagi, saat ini Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem secara mandiri. Purbaya akan memanfaatkan kemampuan tersebut dengan serius ke depan.

Permasalahan juga kerap terjadi adalah user sering gagal akses Coretax dan menemui pesan kesalahan berwarna merah. Purbaya menjelaskan bahwa pesan tersebut sebenarnya menandakan proses masih berjalan, namun karena programnya kurang optimal sistem menampilkan tulisan 'Error'.

Purbaya menambahkan perbaikan akan dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian nilai dalam aplikasi, akses data yang kadang berubah atau salah input serta kecepatan akses yang lambat.

"Nanti dibetulin. Tidak kesesuaian value dalam aplikasi, terus akses data, kadang-kadang berubah angkanya, atau salah masukan. Akses data yang terkadang lambat, case management kurang maksimal, penyebab programming logisnya," ujarnya.

Purbaya juga menelukan lemahnya keamanan siber. Bahkan terdapat data dalam Coretax yang dijual. Kendati demikian, pihaknya telah memperbaiki sistem yang dirancang dengan anggaran triliunan tersebut kini sudah memiliki tingkat keamanan data yang nyaris mencapai 100%.

"Sekarang securitynya Coretax udah bagus sekali, kan dulu saya bilang cybersecuritynya 30 dari 100, sekarang udah 95 plus, jadi kalau udah nilainya udah A plus itu securitynya," terang Purbaya.

Purbaya mengaku telah memilih orang-orang terbaik dari dalam negeri untuk penanganan coretax sehingga bisa diperbaiki dalam waktu lebih cepat. "Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu yang singkat, dari D sampai E, jadi A plus. Jadi cybersecuritynya sudah bagus sekali," ujarnya.

Purbaya meyakinkan masyarakat, khususnya wajib pajak agar tidak perlu khawatir tentang keamanan data. Untuk penanganan masalah yang satu itu, Purbaya menggunakan hacker dari Indonesia. Bahkan dia memuji kemampuan para hacker tersebut. "Orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia

juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu, yang jagoan, kita bayar sih, bantuin saya, jadi sudah ditest, udah lumayan," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menjelaskan bahwa Coretax merupakan tulang punggung dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Program tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dengan misi menciptakan sistem perpajakan modern berbasis kecerdasan digital.

Iskandar mengungkapkan, tender internasional proyek Coretax digelar pada tahun 2021 dengan nilai mencapai Rp1,228 triliun. Pelaksanaannya terbagi ke dalam empat fase besar yang dijadwalkan berlangsung dari 2021 hingga 2025. (han,ist/lut)



Ilustrasi akses Coretax.